



## PELATIHAN KADER DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENGETAHUAN TENTANG JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Edy Susanto\*) ; Sugiyanto ; Irmawati ; Sri Lestari

*Jurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan ; Poltekkes Kemenkes Semarang  
Jl. Tirta Agung ; Pedalangan ; Banyumanik ; Semarang*

### Abstrak

Menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan salah satu cara untuk memelihara kesehatan bagi warga Indonesia. JKN ini telah dijalankan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sejak 1 Januari 2014. BPJS merencanakan bahwa tahun 2014 masyarakat Indonesia yang ikut dalam program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) mencapai 70% dan ditargetkan tahun 2019 mencapai 100%. Salah satu manfaat program jaminan kesehatan nasional adalah untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, belum banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya mengikuti program Jaminan Kesehatan Nasional melalui kepesertaan BPJS Kesehatan. Selain itu, masyarakat juga masih mengalami kebingungan dalam alur pelayanan dalam Jaminan Kesehatan Nasional. Dari permasalahan tersebut diatas, Jurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan bekerjasama dengan BPJS Kota Semarang melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk memberikan pembinaan, pendampingan, konsultasi mengenai program Jaminan Kesehatan Nasional. Dengan pembinaan JKN ini, diharapkan masyarakat mampu memahami pentingnya kepesertaan JKN demi meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat khususnya di Wilayah Posyandu Wijaya Kusuma RW: XXII, Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang.

**Kata kunci:** *Jaminan Kesehatan Nasional ; BPJS Kesehatan ; Rekam Medis ; Posyandu*

### Abstract

[TRAINING OF CARDER IN EFFORTS TO INCREASE THE KNOWLEDGE OF THE NATIONAL HEALTH INSURANCE POSYANDU WIJAYA KUSUMA, VILLAGE METESEH, DISTRICT TEMBALANG] Being a participant of the National Health Insurance (JKN) is one way to maintain good health for the citizens of Indonesia. JKN has been run by the Social Security Agency (BPJS) Health since January 1, 2014. BPJS planned that in 2014 the people of Indonesia who participated in the program of the National Social Security System (Navigation) and is targeted to reach 70% in 2019 to reach 100%. One of the benefits of national health insurance program is to improve the health and welfare of the community. However, not many people are aware of the importance of following the National Health Insurance program through participation BPJS. In addition, people are still confused in a groove in the service of the National Health Insurance. From the above issues, the Department of Medical Records and Health Information in cooperation with BPJS Semarang implement community service activities in the form of providing guidance, assistance, consultation on the National Health Insurance program. With this JKN coaching hoped that the people are able to understand the importance of participation JKN and improved health and welfare of the people especially in the region Wijaya Kusuma Posyandu RW: XXII, Village Meteseh, District Tembalang, Semarang.

**Keywords:** *National Health Insurance ; BPJS Health ; Medical Record ; IHC*

### 1. Pendahuluan

Pengabdian kepada masyarakat adalah

kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat serta

\*) Edy Susanto, SH, S.Si, M.Kes  
E-mail: edy.jrr@gmail.com

mencerdaskan kehidupan bangsa (UU Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012).

Dalam upaya melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi tersebut, penyelenggaraan setiap program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat pula dilaksanakan baik oleh perorangan maupun oleh kelompok sivitas akademika yang pada hakikatnya adalah atas nama lembaga, yakni perguruan tinggi yang bersangkutan sebagai lembaga ilmiah. Karena itu setiap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat pada akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, normatif, organisatoris, serta administratif oleh unsur-unsur pimpinan maupun keseluruhan pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan.

Saat ini setiap tahun diperkirakan 6,6 juta anak di dunia meninggal sebelum mencapai umur 5 tahun. Berdasarkan SDKI (Survei Demografi Kesehatan Indonesia) 2012 ada sekitar 552 balita meninggal setiap harinya. Sebagian besar penyebab kematian balita merupakan penyakit yang dapat dicegah, seperti pneumonia, diare, malaria, campak atau kombinasi dari penyakit tersebut dan dilatarbelakangi oleh malnutrisi. Untuk mencegah penyebab utama kematian balita, WHO dan UNICEF mengembangkan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS). Indonesia telah mengadopsi MTBS sejak tahun 1997, setelah melalui proses adaptasi. Manajemen Terpadu Balita Sakit merupakan keterpaduan tatalaksana balita sakit yang meliputi upaya pengobatan, pelayanan preventif seperti pemberian imunisasi, pemberian vitamin A, serta pelayanan promotif antara lain menilai dan memperbaiki cara pemberian ASI, konseling kepada ibu/pengasuh anak tentang cara merawat dan mengobati anak sakit di rumah, masalah pemberian makan dan sebagainya.

Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia menurut Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 adalah 32/1000 KH, hal ini sudah mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2007 yakni 34/1000 KH. Namun, Angka Kematian Bayi (AKB) tersebut masih jauh dari target Millenium Development Goals (MDGs) yang sudah harus dicapai pada tahun 2015 yaitu AKB 23/1000 KH. (Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI), 2012)

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan jumlah kematian bayi (0-11 bulan) per 1000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. AKB menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat

pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB, serta kondisi lingkungan dan sosial ekonomi. Apabila AKB di suatu wilayah tinggi, berarti status kesehatan di wilayah tersebut rendah.



Gambar 1. Kasus Kematian Bayi Per Karisidenan

AKB di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012 sebesar 10,75/1.000 kelahiran hidup, meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar 10,34/1.000 kelahiran hidup. Dibandingkan dengan target Millenium Development Goals (MDGs) ke-4 tahun 2015 sebesar 17/1.000 kelahiran hidup maka AKB di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012 sudah cukup baik karena telah melampaui target. (Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2012). Angka kematian bayi di Kabupaten Demak pada tahun 2014 sebanyak 142 yang terdiri dari 85 bayi laki-laki (59,85%) dan 57 bayi perempuan (40,15%).

Dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak, program jaminan kesehatan nasional sangat berperan dalam mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan. Jaminan Kesehatan Nasional yang mulai diberlakukan tahun 2014 bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif kepada seluruh masyarakat Indonesia. Namun, belum banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya mengikuti program Jaminan Kesehatan Nasional melalui kepesertaan BPJS Kesehatan. Selain itu, masyarakat juga masih mengalami kebingungan dalam alur pelayanan dalam Jaminan Kesehatan Nasional.

Jurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Semarang sebagai perguruan tinggi yang berkecimpung dalam pendidikan tenaga kesehatan, berkewajiban juga untuk menyelenggarakan pengabdian masyarakat guna melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Bentuk pengabdian masyarakat yang diselenggarakan yaitu ikut berperan serta dalam peningkatan pengetahuan

kader tentang Jaminan Kesehatan Nasional bagi Masyarakat di Wilayah Posyandu Wijaya Kusuma, Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang. Melalui kegiatan ini, Jurusan RMIK akan memberikan sumbangsuhnya kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi pentingnya jaminan kesehatan nasional bagi masyarakat. Dengan adanya program ini, diharapkan masyarakat bisa memahami dan sadar serta mengerti akan pentingnya jaminan kesehatan nasional sehingga semua masyarakat akan mudah dalam memperoleh pelayanan kesehatan dan pada akhirnya tercipta masyarakat yang sehat dan sejahtera.

## 2. Metode

Materi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah Program Jaminan Kesehatan Nasional. Materi ini akan disampaikan kepada kader Posyandu. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah

### a. Pendidikan Kesehatan

Pendidikan kesehatan dilakukan dengan cara memberikan pengetahuan tentang Jaminan Kesehatan Nasional yang meliputi pengertian, tujuan, manfaat, prosedur pendaftaran, dan prosedur pelayanan kesehatan kepada kader di Posyandu Wijaya Kusuma, Kel. Meteseh, Kec. Tembalang

### b. Bimbingan dan Konsultasi

Bimbingan dan konsultasi dilakukan pada sesi diskusi kader dengan memberikan pengetahuan dan mendampingi kader dalam sosialisasi program Jaminan Kesehatan Nasional. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah kader di wilayah kerja Posyandu Wijaya Kusuma, Kel. Meteseh, Kec. Tembalang. Jumlah Peserta (20 Kader Posyandu).

Lokasi Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan di Posyandu Wijaya Kusuma, Kel. Meteseh, Kec. Tembalang.

#### Alur Kegiatan

- a. Penjakagan tempat pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Meteseh
- b. Pengajuan perijinan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Rapat koordinasi jurusan tentang teknis pelaksanaan Pengabmas
- d. Pre Test dan Pelatihan Kader tahap 1
- e. Pelatihan kader tahap 2
- f. Bimbingan dan konsultasi
- g. Kepesertaan dan rencana tindak lanjut

- h. Monitoring dan evaluasi internal kegiatan pelatihan kader Jaminan Kesehatan Nasional.

## 3. Hasil dan Pembahasan

Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat melalui Pelatihan Kader Dalam Upaya Meningkatkan Pengetahuan Tentang Jaminan Kesehatan Nasional Di Posyandu Wijaya Kusuma, Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah peserta pelatihan mencapai 145% dari jumlah peserta yang ditargetkan, hal ini menunjukkan minat yang tinggi dari para peserta untuk mendapatkan pengetahuan yang baru dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat Melalui Pelatihan Kader Dalam Upaya Meningkatkan Pengetahuan Tentang Jaminan Kesehatan Nasional Di Posyandu Wijaya Kusuma, Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang.
- b. Pemahaman masyarakat tentang pentingnya keikutsertaan dalam jaminan kesehatan semakin meningkat. Dengan adanya pemaparan materi, masyarakat mulai memahami bahwa keikutsertaan mereka dalam jaminan kesehatan sangat penting dalam pencapaian tujuan perbaikan kesehatan masyarakat. Mereka juga mulai memahami bahwa perkembangan zaman sejalan dengan perkembangan jenis penyakit yang dapat mengancam kesehatan, tidak hanya kader posyandu wijaya kusuma tetapi juga masyarakat di wilayah posyandu wijaya kusuma. Sehingga dengan adanya pemberian materi tentang pentingnya keikutsertaan dalam jaminan kesehatan, dapat menggugah kesadaran masyarakat agar memiliki jaminan kesehatan untuk mencapai perbaikan kesehatan masyarakat.
- c. Dalam kegiatan pelatihan kader selain dijelaskan tentang perubahan prosedur sistem jaminan kesehatan juga mekanisme pengurusan jaminan kesehatan. Dari tanya jawab yang dilakukan selama penyampaian materi terungkap bahwa sebenarnya pengurus dan anggota kader kesehatan di Posyandu Wijaya Kusuma telah mengetahui program jaminan kesehatan melalui BPJS kesehatan dari media massa baik cetak maupun elektronik. Namun mereka belum mengetahui bagaimana mekanisme pengurusan jaminan kesehatan secara jelas karena belum pernah ada sosialisasi dan

pelatihan yang dilakukan di tingkat desa. Hal tersebut terungkap dari hasil diskusi dalam pelatihan kader bahwa warga ada yang mengalami kebingungan bagaimana harus mengurus BPJS kesehatan ketika ada keluarga mereka yang jatuh sakit dan harus segera mendapatkan pertolongan medis. Apakah langsung dibawa ke rumah sakit atau harus melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama dahulu. Setelah adanya sosialisasi masyarakat jadi mengetahui bahwa prosedur pelayanan kesehatan BPJS harus melalui mekanisme pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama dahulu, meliputi puskesmas, dokter keluarga, dan klinik kesehatan. Jika fasilitas kesehatan tingkat pertama tidak mampu mengatasinya baru dirujuk ke rumah sakit.

- d. Setelah pelaksanaan pelatihan kader, kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam kepesertaan jaminan kesehatan semakin meningkat. Dari diskusi yang dilakukan dengan peserta terungkap bahwa sebenarnya beberapa peserta pelatihan telah melakukan pendaftaran JKN BPJS secara mandiri setelah mereka mengetahui sosialisasi pemerintah melalui media televisi nasional. Walaupun demikian mereka merasa keberatan dengan jumlah nominal iuran kepesertaan yang harus dibayarkan setiap bulannya. Walaupun mengambil kelas tiga yaitu Rp 25.500 per bulan, tetapi jika jumlah anggota keluarga mereka ada lima, maka jumlahnya setiap bulan menjadi sangat besar dan menambah berat beban ekonomi mereka. Padahal menurut ketentuan, pembayaran iuran dilakukan paling lambat tanggal 10 setiap bulan, dan apabila ada keterlambatan dikenakan denda administratif sebesar 2 persen dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 3 (tiga) bulan. Sehingga dengan adanya sosialisasi ini masyarakat menjadi paham dan mengetahui prosedur pembayaran iuran dan denda yang harus dibayarkan jika mereka terlambat membayar iuran secara teratur setiap bulannya.

#### *Pembahasan*

- a. Target peserta pelatihan yang ditetapkan sejumlah 20 peserta. Ternyata jumlah peserta pelatihan yang hadir melebihi target yaitu sejumlah 29 orang peserta. Peserta pelatihan adalah 4 orang pengurus dan 16 kader posyandu wijaya kusuma, 1 ketua RW, 8 Ketua RT, 3 Dosen Jurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, dan 2 petugas BPJS Kesehatan Kota Semarang.
- b. Setelah mengikuti kegiatan pelatihan tentang JKN, pemahaman masyarakat tentang pentingnya keikutsertaan dalam jaminan kesehatan semakin meningkat. Masyarakat mulai memahami bahwa jenis penyakit yang berkembang di masyarakat semakin kompleks, tidak hanya masyarakat kota tetapi juga masyarakat desa. Jenis-jenis penyakit yang tergolong berbahaya yang dahulu hanya menyerang masyarakat kota, sekarang juga banyak dijumpai diidap oleh masyarakat desa. Sehingga dengan adanya pemberian materi tentang pentingnya keikutsertaan dalam jaminan kesehatan, dapat menggugah kesadaran masyarakat bahwa jika tidak mengikuti jaminan kesehatan maka jika sewaktu-waktu mengalami sakit, biaya yang harus ditanggung menjadi sangat besar.
- c. Dalam kegiatan pelatihan kader selain dijelaskan tentang perubahan prosedur sistem jaminan kesehatan juga mekanisme pengurusan jaminan kesehatan. Mekanisme pengurusan jaminan kesehatan dapat dilakukan melalui seluruh cabang kantor BPJS kesehatan. Bagi peserta yang telah memiliki kartu Askes atau kartu jaminan kesehatan lain sebelumnya, hanya tinggal melakukan registrasi di kantor BPJS. Fasilitas kesehatan yang disediakan BPJS Kesehatan bisa dimanfaatkan peserta Askes yang masih menggunakan kartu lama. Khusus untuk peserta TNI/Polri dapat memperlihatkan Nomor Register Pokok (NRP), sedangkan bagi peserta eks JPK Jamsostek juga masih dapat menggunakan kartu Jamsostek yang lama sebelum diterbitkan kartu BPJS Kesehatan. Sedangkan peserta mandiri dapat mendaftar melalui kantor BPJS Kesehatan atau mengunjungi bank yang telah bekerja sama dengan Askes seperti Bank Mandiri, Bank BRI dan Bank BNI. Ketiga Bank ini akan menunjuk kantor cabang tertentu di setiap kota yang dapat menerima pendaftaran peserta. Selain itu juga ditayangkan tutorial pendaftaran JKN BPJS secara on line, sehingga pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang perubahan sistem jaminan kesehatan serta mekanisme pengurusannya mengalami peningkatan.
- d. Setelah pelaksanaan pelatihan kader, kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam jaminan kesehatan semakin meningkat.

Dari diskusi yang dilakukan dengan peserta terungkap bahwa peserta yang belum memiliki kartu jaminan kesehatan memiliki keinginan yang besar untuk segera melakukan pendaftaran JKN BPJS secara mandiri. Namun permasalahan yang mengemuka adalah keterbatasan kemampuan ekonomi untuk membayar iuran kepesertaan yang harus dibayarkan setiap bulannya. Mereka berpikir bahwa jika mereka tidak mengalami sakit, maka besaran iuran yang mereka bayarkan setiap bulan akan menjadi hilang dan sia-sia. Hal tersebut tidak mengherankan karena untuk golongan masyarakat ekonomi lemah sejumlah uang tertentu memang membebani ekonomi keluarga. Pemateri hanya bisa memberi semangat bahwa jika sebagai peserta tidak mengalami sakit maka sejumlah rupiah yang dibayarkan tersebut harus dianggap sebagai amal. Kemudian juga mendorong untuk bersyukur karena telah diberi kesehatan.

#### 4. Simpulan dan Saran

##### Simpulan

- a. Masyarakat masih banyak yang belum memahami tentang arti penting JKN.
- b. Masih terdapat banyak permasalahan terkait prosedur klaim, kualitas pelayanan yang diberikan, dan alur pelayanan kesehatan peserta BPJS di fasilitas pelayanan kesehatan.

##### Saran

- a. Perlu diadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di daerah yang lainya agar masyarakat dapat lebih memahami mengenai program Jaminan Kesehatan Nasional.

- b. Perlu memberikan masukan kepada pihak BPJS Kesehatan agar memperbaiki pelayanan kesehatan para peserta BPJS Kesehatan.

#### 5. Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Semarang, DIPA Poltekkes Kemenkes Semarang yang telah mendanai pengabmas ini, Tim penyusun pengabmas dan semua pihak yang terlibat dalam pengabmas ini.

#### 6. Daftar Pustaka

- IFHIMA. 2012. Education Module for Health Record Practice. <https://ifhima.files.wordpress.com/2014/08/module1the-health-record.pdf> diakses tanggal 29 Januari 2015.
- Indradi S, Rono. 2013. Materi Pokok Rekam Medis. Tangerang Selatan.
- Rustiyanto, Ery. 2009. Etika Profesi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Kemenkes RI. 2013. Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jakarta.
- RI. 2004. Undang-Undang No. 40 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jakarta.
- RI. 2009. Undang-Undang No. 36 Tentang Kesehatan. Jakarta.
- RI. 2011. Undang-Undang No. 24 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Jakarta.
- RI. 2013. Peraturan Presiden No. 111 Tentang Jaminan Kesehatan. Jakarta.